

Sejarah dan Keadaan Pendidikan Tinggi Kepolisian di Indonesia : Masalah dan Prospek

Awaloedin Djamin

I. Pendahuluan

Beda dengan dunia kemiliteran, yang banyak persamaan antar negara, Kepolisian antar negara sangat beraneka ragam, tergantung dari sejarah, sistim ketatanegaraan, landasan perundang-undangan dan sebagainya.

Tulisan-tulisan mengenai tujuan, peran, fungsi, tugas, pengorganisasian dan sistim manajemen personal kepolisian, juga bermacam-macam, tidak hanya tulisan-tulisan pakar luar negeri, tapi juga pakar dalam negeri.

Tulisan ini mengambil rumusan, visi, misi, tujuan, peran, fungsi, tugas pokok dan tugas-tugas kepolisian negara RI, dari rumusan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama UU NO. 2. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. Pendidikan tinggi dan Perguruan Tinggi Kepolisian

Pendidikan tinggi adalah tingkat pendidikan di atas pendidikan menengah termasuk yang terdapat di luar lembaga-lembaga Perguruan Tinggi yang diatur dalam perundang-undangan. Perguruan Tinggi di Indonesia terdiri atas : 1. Akademi, 2. Poli Teknik, 3. Sekolah Tinggi, 4. Institut, dan 5. Universitas. Dengan demikian, SELAPA (dulu Sekkopol), SESPIM (dulu SESKOPOL) ditambah dengan SESPATI adalah pendidikan tinggi yang tidak termasuk dalam arti "Perguruan Tinggi".

Pada zaman Hindia Belanda, ada Kursus Komisararis Polisi, dimana salah satu siswanya adalah alm. Bapak R.S. Soekanto. Kursus Komisararis Polisi adalah pendidikan tertinggi kepolisian di zaman itu.

Dalam undang-undang Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan Akademi, Politeknik dan D3 adalah pendidikan profesi, sedangkan Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas adalah pendidikan akademis.

Penulis sewaktu menjabat sebagai anggota dan Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, kurang sepakat dengan pembedaan profesi dan akademis secara ketat. Bila akademis dianggap pendidikan yang memberikan gelar kesarjanaan, itu mungkin benar. Banyak pendidikan di Perguruan Tinggi disamping akademis sebenarnya juga mendidik profesi seperti kedokteran, teknik, akuntansi dan sebagainya. Pendidikan administrasi atau manajemen di Perguruan Tinggi juga merupakan akademis dan profesi, apa itu *business administration*, *public administration*, *hospital administration*, *police administration* dan sebagainya.

Pengertian umum tentang "*profession*" dan "*professionalism*", antara lain :

1. Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaan.
2. Keahlian yang didasarkan pada pendidikan dan pelatihan berjangka panjang.
3. Pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya.
4. Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi.

Yang diperlukan negara berkembang disamping pengetahuan (*knowledge*) adalah *skill*, kemampuan atau ketrampilan disemua bidang, baik bidang teknis ataupun bidang manajemen.

Ilmu pengetahuan pun membagi "*pure science*" dan "*applied science*"

Semua bidang profesi, pada umumnya memiliki etika profesi masing-masing. Demikian pula kepolisian. Hampir semua kepolisian di dunia memiliki rumusan etika secara tertulis dan seperti semua etika, diharapkan agar semua anggota tidak melanggar kode etik dan bersikap dan berperilaku sesuai profesi masing-masing. Sering pula "*code of ethics*" disebut "*code of conduct*".

III. Akademi Polisi dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Pada masa revolusi fisik, Kepala Kepolisian Negara R.S. Soekanto dan beberapa guru besar terkenal waktu itu menyadari, bahwa dalam alam kemerdekaan, kepolisian Indonesia memerlukan perwira-perwira yang berpendidikan akademis. Maka, pada tanggal 17 Juni 1946 didirikan "Polisi Akademi", kemudian berganti menjadi Akademi Polisi. Selama revolusi itu, Akademi Polisi membuka dua angkatan, namun karena revolusi juga berarti perang mempertahankan kemerdekaan, kedua angkatan tersebut sering dilibatkan dalam perjuangan kemerdekaan.

Setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota RI kembali ke Jakarta, termasuk Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN). Kepala Kepolisian Negara, para guru

besar, setelah membahas keberadaan Akademi Polisi, menetapkan untuk meningkatkan Akademi Polisi menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang resmi dibuka tahun 1950, yaitu perguruan tinggi kedinasan dengan memberikan gelar doctorandus (Drs.), mengikuti sistim pendidikan tinggi Belanda.

Buat pertama kali istilah "ilmu kepolisian" digunakan di Indonesia secara resmi. Ini merupakan momentum bersejarah dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Angkatan I dan II Akademi Polisi masa revolusi, dipindahkan ke PTIK dan merupakan angkatan I dan II PTIK. Jadi, angkatan pertama yang diterima pada tahun 1950, menjadi angkatan ke III. Para guru besar dari Universitas Indonesia yang terkenal waktu itu, seperti Prof. Djokosutono, Prof. Sunario Kolopaking (kemudian menggunakan nama Sunario Sanyatawijaya), Prof. Sumitro Djojohadikusumo, Prof. Prijono, Prof. Satochid, Prof. Noach, Prof. Beerling, dan lain-lain adalah guru besar-guru besar PTIK. Perkuliahan sebagian besar digabung dengan Universitas Indonesia, terutama Fakultas Hukum.

Untuk mata pelajaran khas kepolisian, seperti dactiloscopi, kriminalistik, sejarah kepolisian dan lain-lain ketrampilan dasar kepolisian diselenggarakan di PTIK (Kampus jalan Tambak) atau di Sekolah Polisi Negara di Sukabumi. Untuk bidang kriminalistik, Polri mendatangkan guru besar dari Belgia, Prof. Gunsburg dan Ceulenaar.

Dipengaruhi oleh sistim pendidikan Belanda perkuliahan dibagi untuk C1, C2, D1 dan D2 dan mata pelajaran di PTIK sebagian besar adalah dibidang hukum. Ilmu administrasi atau manajemen belum dikenal waktu itu.

Walaupun PTIK dengan ilmu kepolisian diprakasai oleh guru-guru besar terkenal Indonesia waktu itu dengan Ketua Dewan Kurator Sultan Hamengku Buwono IX, dengan anggota-anggota antara lain Menteri Dalam Negeri, Ketua Mahkamah Agung, keberadaan ilmu kepolisian masih diperdebatkan dikalangan perguruan tinggi Indonesia.

Perjuangan "status" PTIK ini berlarut larut, walaupun PTIK terus berkembang dengan meluluskan para sarjana (doctorandus) sampai tahun 1978-1979. Keberadaan PTIK dan ilmu kepolisian ini baru dituntaskan waktu penulis menjabat KAPOI.RI pada tahun 1979, setelah bersama Menteri P & K Daud Yusuf membentuk tim membahas secara mendalam tentang ilmu kepolisian. Kenapa KAPOI.RI yang baru menjabat dan menghadapi banyak masalah, langsung

mengurus "status" PTIK?. Salah satu sebabnya adalah gagasan MABES ABRI untuk membubarkan PTIK, karena tidak dikenal di AD, AL dan AU.

Dalam SK bersama Menteri P & K dan KAPOLRI ditetapkan bahwa Universitas Indonesia menjadi Pembina Akademik dari PTIK dan Dekan PTIK dijabat oleh Guru Besar Universitas Indonesia yang diangkat oleh Menteri P & K setelah konsultasi dengan KAPOLRI.

Kemudian Departemen P & K menetapkan Universitas Diponegoro sebagai pembina akademik Akademi Polisi.

Dekan pertama yang diangkat dan dilantik Menteri P & K adalah Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar (alm.). Dalam upacara pelantikan Dekan Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, Menteri P & K menyampaikan pidato tentang ilmu kepolisian. Maka secara resmi status PTIK telah dituntaskan dan tidak ada lagi alasan MABES ABRI membubarkan PTIK.

Dekan PTIK bertanggungjawab dibidang akademis dan Gubernur PTIK dijabat oleh perwira tinggi aktif Polri dan bertanggungjawab dibidang kemahasiswaan dan pembinaan : (Pada tahun 1950-an jabatan Gubernur itu disebut Sekretaris PTIK kemudian Administratur PTIK).

Waktu Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar ditarik ke Departemen P & K oleh Menteri Fuad Hasan untuk menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, penulis telah pensiun dan menjabat Penasihat KAPOLRI, Drs. Moh. Sanusi.

KAPOLRI, M. Sanusi, minta perantaraan penulis untuk merundingkan dengan Menteri P & K tentang calon pengganti Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar sebagai Dekan PTIK. KAPOLRI Sanusi mencalonkan tiga nama, yaitu Prof. Surjono Sukanto (alm.), Prof. Padmo Wahjono dan Prof. Sutjipto Rahardjo (dari Undip dan juga dosen PTIK).

Dalam pembicaraan penulis dengan Menteri Fuad Hasan, Menteri Fuad Hasan mengatakan sebaiknya Dekan PTIK itu diambilkan dari Guru Besar UI yang lebih mengerti tentang Kepolisian RI. Menteri Fuad Hasan "mendaulat" penulis untuk menggantikan Prof. Harsya W. Bachtiar, karena penulis adalah juga Guru Besar UI semenjak 1980, jadi sesuai dengan SK bersama Menteri P & K dan KAPOLRI. Penulis mulanya menolak, namun Menteri Fuad Hasan mendesak dengan mengatakan, bahwa penulis sebagai alumnus PTIK masak tidak mau membantu perkembangan PTIK. KAPOLRI M. Sanusi juga sependapat dengan Menteri P & K. Maka jadilah penulis Dekan PTIK selam 15 tahun, disamping menjabat Guru Besar UI dan Rektor Universitas Pancasila (selama 12 tahun).

PTIK angkatan ke III diambil dari umum dan perwira tamatan SMA. Sebagai bagian dari ABRI, Polri mendirikan lagi AKABRI bagian Kepolisian. Dengan demikian terdapat dua lembaga perguruan tinggi di lingkungan Polri. Seperti diuraikan di atas, disamping perguruan tinggi, Polri memiliki lembaga pendidikan tinggi, yaitu SELAPA dan SESPIM. Keberadaan kedua lembaga pendidikan terakhir ini adalah mengikuti kelembagaan yang ada di lingkungan ABRI, yaitu SEKKO dan SESKO. Polri membentuk SEKKOPOL (kemudian berganti SELAPA) dan SESKOPOL (kemudian menjadi SESPIMPOL), karena polisi tidak lagi menggunakan istilah "komando". Bila angkatan perang memiliki komando, seperti kompi, batalyon, armada dan squadron, maka Polri memiliki "komando kewilayahan" yaitu Polres, Polwil dan Polda.

Dalam perundang-undangan mengenai Sistem Pendidikan Nasional, AKPOL dan PTIK termasuk perguruan tinggi kedinasan, karena itu diarahkan pada kebutuhan personil Polri.

Pendidikan kedinasan dari tingkat tamtama, bintangara, AKPOL, PTIK dan SESPIM, serta juga semua pendidikan dan latihan kejuruan (Pusdik operasional dan pembinaan) direncanakan dan dilaksanakan sebagai sub-sistem yang integral dari sistem manajemen personil Polri. Karena itu syarat penerimaan dan seleksi siswa (taruna/mahasiswa) serta pendidikan dan latihan harus mempunyai tujuan/output yang jelas.

Terutama bagi pendidikan tinggi Polri, AKPOL, SELAPA, PTIK dan SESPIM, pengaturan kurikulum, tenaga pengajar, metode belajar-mengajar dan sarana pendidikan harus ada keserasian.. Keserasian dibidang pendidikan tersebut hanya dapat dicapai dengan koordinasi fungsional yang tepat dan seksama. Tanpa koordinasi untuk adanya keserasian tidak mungkin dihasilkan output lembaga-lembaga pendidikan seperti yang diharapkan.

Pendidikan dasar kepolisian di dunia adalah untuk mendapatkan anggota yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai "*general duty police*" (dulu namanya polisi tugas umum dan sekarang Sabhara), dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi, sesuai kepangkatan. Untuk mendapatkan bintangara kejuruan reserse misalnya, diambilkan dari bintangara tugas umum dengan diklat tambahan dibidang reserse.

AKPOL, SELAPA, PTIK dan SESPIM, bukan lembaga pendidikan kejuruan, walaupun semua memiliki pengetahuan dan kemampuan sabhara sesuai tingkatannya.

AKPOL, SELAPA, PTIK dan SESPIM adalah lembaga pendidikan manajemen kepolisian (*police management*), AKPOL untuk "*supervisory level police management*" SELAPA, PTIK untuk "*middle police management*" dan SESPIM untuk "*high level police management*".

Police management (atau *police administration*) adalah kata majemuk, dan bukan terpisah *police* dan *management*, seperti hanya *public administration*, *business administration*, *hospitas administration*, dan sebagainya. Perbedaannya terdapat pada bidang substantif yang di manage.

Mengenai hubungan AKPOL dan PTIK, disesuaikan dengan ketentuan pemerintahan, pendidikan AKPOL, yang profesi dan menghasilkan D3, dihitung SKS-nya untuk kemudian bila masuk PTIK ditambah dengan SKS di PTIK, sehingga memenuhi syarat untuk S1.

Dengan demikian, harus ada sinkronisasi kurikulum AKPOL dan PTIK. Disamping itu, sesuai dengan ketentuan dan juga kebutuhan Polri. AKPOL tetap mengutamakan profesi, kemampuan dan ketrampilan (*skill supervisory level police management*).

Masalah yang telah bertahun-tahun dihadapi adalah jumlah tamatan AKPOL dan daya tampung PTIK.

Sebenarnya, dulu, telah ada kebijakan, bahwa tamatan AKPOL yang tidak masuk PTIK dapat masuk SELAPA. Tujuan pendidikan, PTIK dan SELAPA sama, yaitu kemampuan *middle police management* dengan perbedaan PTIK adalah pendidikan akademis dengan gelar S1, Tamatan SELAPA dan PTIK setelah memenuhi syarat dapat masuk SESPIM.

Masalah lain adalah karena keterbatasan penerimaan di PTIK, sedangkan anggapan bahwa tanpa PTIK, seseorang perwira tidak akan memenuhi syarat kenaikan pangkat dan karier, maka tidak dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan masuk PTIK. Karena soal "syarat duit" telah berlarut-larut, maka KAPOLRI Drs. Da'i Bachtiar, SH. menghapus praktek demikian dengan meniadakan ujian dan seleksi PTIK bagi tamatan AKPOL. Semua tamatan AKPOL dapat langsung masuk PTIK, kecuali ada "cacat" yang dibuat oleh perwira yang bersangkutan waktu praktek di lapangan.

Untuk ini daya tampung PTIK perlu diperluas, tidak hanya dengan memperbanyak ruang kelas, tapi dengan merubah sistim semester menjadi trimester, mengadakan praktek lapangan (magang) dan kuliah jarak jauh.

Semua ini adalah hal yang baru, karena setelah waktu tertentu perlu dievaluasi, agar mutu yang diharapkan tidak berkurang.

Yang agak aneh, dalam pendidikan ABRI khususnya di AKABRI (juga AKPOL termasuk didalamnya) semenjak Orde Baru, tidak menerima wanita di AKABRI. Aneh, karena di Amerika Serikat sudah sejak lama menerima wanita di West Point, dan lain-lain bahkan sudah ada yang mencapai pangkat Letnan Jendral. PTIK yang dulu menerima wanita, karena tergantung dari tamatan AKPOL, sudah lama pula tidak mendidik polisi wanita. Hal ini, pertama, tidak adil (diskriminatif), dan kedua, di kepolisian negara-negara maju polisi wanita sangat berperan. Oleh karena itu penulis memprakasai adanya D3 di PTIK khusus untuk Polwan tamatan SEBA Polwan. Karena jumlah Polwan tamatan SEBA (yang masuknya juga tamatan SMA) sudah cukup banyak.

Setelah sekian lama baru ada Polwan tamatan D3, masuk PTIK yang prestasinya sangat baik.

Yang tamat D3 Polwan yang masuk PTIK masih sangat terbatas. setelah AKPOL dibuka buat wanita, penerimaan D3 terhenti. Penulis menyarankan agar D3 Polwan diteruskan sampai tamatan AKPOL mencukupi, sehingga kesempatan dan kebutuhan polisi wanita S1 akan lebih proposional dibanding pria.

Seperti ditulis terdahulu, harus ada sinkronisasi antara AKPOL, SELAPA, PTIK, SESPIM dan sekarang ditambah SESPATI.

Karena AKPOL, PTIK dan SESPIM terpisah satu sama lain dan dipimpin oleh Inspektur Jendral, sedangkan SELAPA termasuk lingkup direktorat pendidikan dan latihan, maka kiranya Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) diaktifkan dipimpin oleh WAKAPOLRI dan bertanggung jawab kepada KAPOLRI. yang disinkronkan tidak hanya kurikulum dan tenaga pengajar, tapi juga kepangkatan yang disyaratkan.

Dulu SESKO, termasuk SESKOPOL adalah lembaga pendidikan bagi perwira menengah (Letkol senior dan Kolonel Yuniior) yang potensial untuk menjadi Brigadir Jendral.

Pengadaan SESPATI hasil konsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara perlu dievaluasi terkait dengan evaluasi SESPIM yang perlu segera diadakan, apakah SESPATI perlu terus diadakan atau tidak.

SESPATI, LAN sendiri, yang semula diadakan untuk mendidik calon pejabat

eselon I di Departemen dan Lembaga Pemerintah non Departemen, bagi Pegawai Negeri Sipil, juga menghadapi berbagai masalah.

IV. Pendidikan Tinggi bagi Perwira Polri di luar lembaga di lingkungan Polri.

Polri. Contohnya, 25 perwira yang ditugas belajarkan pada Fakultas Kriminologi UI, setelah mendapat S1, semuanya minta masuk PTIK, karena anggapan bahwa hanya sebagai tamatan PTIK karir mereka akan terjamin.

Fakta psikologis untuk masuk PTIK inilah bahkan juga SESPIM dan AKPOL, menyebabkan bagi yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa dan perwira siswa. Hal ini harus dihapus atau ditekan serendah mungkin, agar prinsip "*career with merit system*", sistim karier berdasarkan prestasi dapat ditegakkan dilingkungan Polri.

Belajar di perguruan tinggi di dalam negeri atas prakarsa dan biaya pribadi-pribadi oleh lembaga Polri, tanpa mengganggu tugas kedinasan, sebenarnya merupakan hal yang patut didorong. Yang harus dicegah adalah "pembelian" gelar yang melanggar UU Sisdiknas.

Tugas belajar, dalam dan luar negeri, untuk gelar dan non gelar, memang harus direncanakan secara baik disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan Polri dimasa depan. Hal ini memerlukan penataan sistim manajemen personil Polri menyeluruh.

V. Prospek masa depan

Bahwa tantangan masa depan Indonesia cukup berat di era persaingan global dan regional, sedangkan kita belum tuntas memulihkan krisis yang multi dimensi; dampaknya tidak dapat tidak juga akan terasa pada Polri yang sedang mereformasi diri.

Dalam era reformasi, dimana rakyat Indonesia mengharapkan dan mendambakan demokratisasi, *civil society*, *good governance*, kesejahteraan yang lebih baik dan merata, supremasi hukum dengan keadilan, kepastian hukum yang melindungi jiwa, harta benda dan hak-hak azasi manusia serta keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri juga harus mengadakan reformasi menyeluruh. Reformasi yang telah dimulai semenjak tahun 1999, perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Tantangan kriminalitas, terutama terorisme dan *transnational crime* telah melanda Indonesia dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi menambah kompleksnya tugas Polri. Demikian pula dampak keadaan politik, ekonomi dan sosial seperti SARA, mengharuskan Polri mengikuti perkembangan keadaan secara cepat dan seksama, agar dapat menyiapkan langkah-langkah preventif dan pre-emptif yang tepat.

Untuk ini kehadiran KAPOLRI disidang-sidang kabinet sebagai "*cabinet member*" (bukan menteri) sudah tepat, karena dengan demikian Polri dapat mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah secara dini.

Dalam era reformasi, setelah Polri pisah dari ABRI, pembangunan Polri cukup berarti, baik pembangunan sarana dan prasarana, maupun penambahan jumlah personil. Prestasi Polri dalam menangani terorisme Bom Bali dan Hotel Marriott dapat dibanggakan menurut ukuran dunia. Hal ini telah menaikkan citra Polri dan Indonesia di luar negeri.

Disamping tantangan external, Polri harus segera dan secara sistimatis dan bertahap menangani tantangan internal.

Tantangan internal yang penting dan mungkin yang terberat adalah dibidang pengorganisasian, tata cara kerja dan sistim manajemen personalia atau SDM, dimana sistim manajemen pendidikan merupakan bagian integral yang penting.

Sebagai organisasi nasional yang besar dan kompleks, hal yang tersebut diatas tidak mudah bagi Polri untuk dipecahkan dan dilaksanakan.

Pendidikan tinggi kepolisian merupakan bagian dari seluruh manajemen pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Polri sendiri, ataupun yang diselenggarakan Polri pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri.

Tujuan pendidikan adalah mendapatkan anggota Polri yang berpengetahuan dan berkemampuan sesuai kebutuhan, karena pendidikan Polri diarahkan pada penempatan yang sesuai dan untuk pengaturan karier yang mendorong anggota Polri untuk berprestasi. Dalam manajemen personil atau SDM, yang terpenting untuk dibuat adalah rencana personil atau "*manpower planning*".

Bila Polri dapat menata diri semua dalam 5 tahun mendatang, maka keberadaan Polri yang profesional, Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat akan lebih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.